

Pengaruh Politik Etis Pada Pengembangan Pendidikan di Bali 1900-1928

M. Al Qautsar Pratama
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email: aqautsar@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Politik Etis; Pendidikan; Bali.</p>	<p>Penerapan politik etis oleh pemerintah Hindia Belanda banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan masyarakat pribumi. Penerapan politik etis sebagai politik balas budi yang bertumpu pada irigasi, imigrasi dan edukasi. Secara garis besar, politik etis merupakan sebuah upaya balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda (Indonesia) atas eksploitasi yang dilakukan Belanda. Dalam pelaksanaannya di berbagai daerah memang memiliki reaksi yang berbeda-beda. Hal ini pun terjadi di Bali, dalam dunia pendidikan dampak politik etis dengan berdirinya sekolah dan organisasi yang menjadi embrio dalam kebangkitan nasional terutama di Bali. Tulisan ini bertujuan untuk mengupas kondisi sosial, politik, ekonomi terutama pendidikan masyarakat Bali di era Hindia Belanda dan pengaruh politik etis dalam perkembangan organisasi-organisasi yang menjadi embrio kebangkitan nasional di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sistem pendidikan kolonial memberikan warna tersendiri dalam masyarakat di beberapa daerah di Indonesia seperti halnya dialami oleh masyarakat di Jawa. Kebijakan etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam pendirian sekolah bagi anak-anak pribumi di Indonesia dianggap sebagai langkah awal dalam perjuangan kaum muda. Walaupun sebagian besar yang diberi izin untuk bersekolah berasal dari kalangan bangsawan atau elit pribumi, pada akhirnya, anak-anak dari kelompok tersebut muncul sebagai kelompok intelektual.</p>

Pendahuluan

Manusia dan pendidikan adalah dua hal yang sangat berkaitan, pendidikan merupakan suatu proses yang selalu dialami oleh setiap manusia untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri individu tersebut. Manusia sebagai makhluk yang berdimensi jasmani dan rohani dapat dididik dan dapat pula

mendidik.¹ Kebijakan Politik Etis menarik untuk diselidiki karena sebenarnya merupakan kebijakan dasar dalam sejarahnya, yang dalam implementasinya menjadi bentuk baru dari masa kolonial Belanda di Indonesia. Era tersebut diklaim sebagai bentuk kolonialisme yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Hindia Belanda melalui kampanye pengembangan pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Meskipun demikian, dalam praktek kebijakan politik, Etika dinilai lebih menjanjikan daripada pelaksanaannya, dan fakta penting mengenai eksploitasi dan penaklukan tetap tidak berubah. Dasar Politik Etis terletak pada isu-isu kemanusiaan dan ekonomi.² Oleh karena itu, dalam prakteknya, politik Etis tetap menjadi bentuk baru dari kolonialisme atas Hindia Belanda. Puncak dari politik Etis adalah munculnya intelektual Indonesia sebagai hasil dari pendidikan Barat yang menghasilkan kesadaran untuk berjuang demi tanah air melalui gerakan nasional. Salah satu isu yang menarik dari pelaksanaan politik etis adalah pendidikan dikarenakan memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan seluruh aspek kehidupan bangsa. Pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa diakui, dan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk sekolah umum dan sekolah kejuruan, dianggap sebagai penunjang utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Kebutuhan akan tenaga kerja terampil yang ekonomis oleh pemerintah dan pengusaha swasta di Hindia Belanda menjadi motivasi munculnya sistem sekolah barat di wilayah tersebut. Tujuan utama pendirian sekolah tersebut adalah untuk menggantikan tenaga kerja terampil dari bangsa Belanda atau bangsa Barat lainnya yang dianggap mahal pada saat itu.³

Pengaruh politik Pemerintah Hindia Belanda di berbagai daerah di Indonesia menyatakan bahwa setiap wilayah memiliki respons yang berbeda terhadap pengaruh tersebut. Perbedaan ini dapat terlihat dalam rentang waktu, menunjukkan variasi dalam waktu kedatangan pengaruh Pemerintah Hindia Belanda ke berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, perbedaan ini, ketika diselidiki lebih lanjut, melibatkan isu-isu kompleks yang memunculkan pertanyaan tentang penyebab perbedaan tersebut. Yang pasti, faktor-faktor kondisi dan situasi juga turut berperan dalam dinamika ini. Sebagai contoh pada awal abad ke-20, situasi politik di Pulau Jawa mencerminkan awal dari kebijakan politik etis yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dalam konteks ini, perbandingan dengan kondisi di Bali menunjukkan perbedaan yang signifikan. Antara tahun 1846 hingga 1908, Bali masih terlibat dalam konflik perang melawan penjajahan Belanda, yang termasuk Perang Buleleng, Perang Jagaraga, Perang

¹ Setiawan, A. I., & Pratama, M. A. Q. Karakteristik Pendidikan Islam Periode Nabi Muhammad Di Makkah dan Madinah. NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, No.2 (2018). 130-137, <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.958>.

² Ricklefs, Merle Calvin. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. (Jakarta: Serambi, 2008).

³ Paeni, M. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Pengetahuan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 46.

Banjar, Puputan Badung, dan Puputan Klungkung. Oleh karena itu, hingga awal tahun 1900, Bali belum sepenuhnya dikuasai oleh Belanda.⁴

Meskipun Bali telah menjalani hubungan dengan pihak asing sejak lama, tetapi hingga saat itu, kontak-kontak tersebut belum membawa dampak yang signifikan. Hubungan dengan bangsa Barat pada abad ke-17 hingga ke-18 terbatas pada masalah perdagangan budak yang terkait erat dengan penggunaan tenaga kerja untuk keperluan tentara bayaran. Intervensi Belanda di Pulau Bali baru terlihat setelah Buleleng berhasil ditaklukkan secara menyeluruh, dan kemudian Singaraja dijadikan ibukota keresidenan Bali dan Lombok. Sejak saat itu, pemerintah Belanda secara bertahap melakukan perbaikan dan mulai memperkenalkan pola pikir Barat. Langkah awal dilakukan melalui sektor pendidikan.

Di ranah administrasi pemerintah Hindia Belanda, upaya pembukaan Sekolah Rendah (*Tweede Inlandsche School*) di Bali pada tahun 1875, khususnya di kota Singaraja, berhasil direalisasikan. Meskipun, pada awalnya, inisiatif ini tidak disambut baik oleh masyarakat, sehingga pemerintah menghadapi kesulitan dalam merekrut murid. Beberapa faktor menjadi penyebab, termasuk faktor latar belakang kebudayaan masyarakat Bali. Kebudayaan Bali, yang memiliki akar Hindu, menunjukkan nilai-nilai budaya yang melibatkan aspek sosial seperti norma kesopanan, tata krama, agama, seni, dan sebagainya, yang semuanya didasarkan pada kebudayaan Hindu. Karya sastra seperti Ramayana dan Bharatayudha membentuk dasar pemikiran masyarakat Bali, dan unsur-unsur Hindu yang kuat juga tercermin dalam adat istiadat dan agama, di mana ajaran-ajaran spiritual dipelajari dengan tekun. Faktor pertama ini menciptakan struktur masyarakat Bali menjadi empat lapisan yang dikenal sebagai catur warna atau catur wangsa. Hanya kelompok elit, seperti Brahmana dan Ksatria, yang dapat menikmati sistem pendidikan tradisional yang berbasis pada kesusastraan dan agama Hindu. Hal ini disebabkan oleh fanatisme dan struktur kehidupan sosial yang selalu tunduk pada norma-norma agama dan kasta.⁵

Dampak politik kolonial Belanda terhadap peningkatan tatanan kehidupan di Bali menyebabkan masalah dalam sistem status sosial. Upaya pemerintah Belanda untuk merubah sistem pemerintahan masih belum sepenuhnya menerapkan sistem pemerintahan yang modern. Hal ini terlihat jelas dalam proses pengangkatan pegawai negeri, di mana pemerintah Hindia Belanda masih menggunakan sistem tradisional yang menilai seseorang berdasarkan kasta, bukan kriteria legal rasional. Perbedaan status ini memicu konflik sosial di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Bali Utara.

⁴ Agung, A. A. G. P. "*Lahirnya Ide-Ide Pembaharuan dalam Organisasi Sosial di Bali.*" *Basis Majalah Ilmiah* (1972): 183-189.

⁵ Reuter, Thomas, ed. *Inequality, crisis and social change in Indonesia: The muted worlds of Bali.* Routledge, 2003.

Keadaan seperti ini memicu tuntutan dari sebagian golongan Jaba⁶ yang terpelajar, agar golongan Tri wangsa mau saling menghargai dan menghormati sesuai dengan tuntutan zaman dalam kehidupan sehari-hari. Tuntutan juga diarahkan kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu agar pemerintah bisa menilai calon pegawai pemerintahan atau kepala pemerintahan berdasarkan tingkat pendidikan, bukan melalui sistem tradisional yang masih digunakan.⁷ Dalam artikel ini berusaha menggambarkan kondisi pengembangan di Bali dari akibat diterapkannya politik etis, dan bagaimana pengaruh politik etis terutama di bidang pendidikan dalam upaya tumbuhnya organisasi-organisasi pergerakan nasional berskala lokal di Bali sebagai embrio kebangkitan nasional.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah, langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik, interpretasi dan historiografi. Penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau manusia. Tujuannya adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif. Dalam tahapan heuristik menjadi tahapan yang penting bagi penulisan sejarah, karena heuristik menjadi tahapan dasar dalam menentukan dan mengumpulkan sumber, data dan fakta dalam sebuah peristiwa sejarah.⁸

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan politik etis di Indonesia mengalami variasi dalam penerimaannya di setiap daerah. Perbedaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi dan situasi unik masing-masing wilayah, tetapi juga oleh kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang terkait dengan politik kolonial pada masa itu. Contohnya, di Bali, campur tangan Belanda baru terlihat sepenuhnya setelah penaklukan Kerajaan Klungkung. Sejak saat itu, pemerintah kolonial Belanda secara bertahap melakukan perbaikan dan mulai memperkenalkan konsep-konsep Barat di Bali, meskipun sebenarnya hal ini tidak diinginkan oleh pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perubahan ini menjadi lebih jelas setelah Singaraja menjadi ibu kota Keresidenan Bali

⁶Maksud dari kasta "Jaba" adalah bahwa kasta Sudra, yang merupakan mayoritas di Bali, memiliki posisi sosial yang paling rendah dalam sistem kasta. Dalam hal ini, istilah "jero" digunakan untuk merujuk pada tempat tinggal atau ruang pribadi, sementara kasta Sudra (jaba) sering kali dianggap harus berbicara dengan tingkat kesopanan yang tinggi, yang disebut "*Sor Singgih Basa*," ketika berinteraksi dengan orang yang berasal dari kasta yang lebih tinggi.

⁷ Kartodirjo, Sartono. "*Introduction to the History of Indonesia: From Emporium to Imperium*." (Yogyakarta: Ombak, 2014).

⁸ Sukmana, W. J. *Metode penelitian sejarah. Seri Publikasi Pembelajaran*, (Semarang: Garudhawacana: 2016), 1-4.

dan Lombok. Terbukti bahwa implementasi politik etis ini pada akhirnya memicu tumbuhnya semangat nasionalisme di kalangan penduduk Bali.⁹

Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi Masyarakat Bali Pada Akhir Abad XIX

Antara abad XIV hingga XIX Bali memang mengalami perubahan besar, namun perubahannya sangat endogen. Artinya, Islamisasi dan dominasi Belanda tidak sampai mengubah tatanan sosial dan kultural masyarakat Bali. Dibandingkan dengan daerah-daerah Hindu lainnya di Nusantara, sejarah Bali jauh lebih ortogenetik dan teratur. Bali di abad XIX mungkin bukan replika dari Bali.¹⁰ Jika melihat kehidupan sosial politik masyarakat Bali pada akhir abad ke XIX maka tidak akan lengkap kalau tidak membahas mengenai tata kelola pemerintahan tradisional dan kondisi sosial ekonominya. Sebagai contoh Struktur pemerintahan tradisional telah lama menjadi dasar bagi sistem pemerintahan di Bali. Ini terlihat secara nyata dalam sistem birokrasi tradisional di wilayah kerajaan yang tetap berlangsung hingga akhir abad ke-XIX, ketika terjadi kontak politik dengan pemerintahan kolonial Belanda. Pada sekitar tahun 1800, situasi kerajaan tradisional di Bali terdiri dari sembilan kerajaan, antara lain:

1. Sebelum tahun 1800, Kerajaan Buleleng diperintah oleh raja-raja keturunan Panji Sakti, namun sejak tahun 1804 dikuasai oleh keturunan raja-raja Karangasem.
2. Pada tahun 1950, Jemarana berada di bawah pemerintahan Kerajaan Buleleng.
3. Tabanan merupakan kerajaan yang tidak berdiri sendiri; sebagian berada di bawah Kerajaan Badung dan sebagian lagi di bawah Kerajaan Buleleng dan Karangasem.
4. Kerajaan Bandung, yang didirikan oleh Gusti Ngurah Made Pemecutan, pada tahun 1800 menyatakan kemerdekaannya dengan melepaskan diri dari Kerajaan Mengwi.
5. Pada tahun 1800, Klungkung berhasil mengalahkan Bangli, namun pada tahun 1805, Bangli berhasil membebaskan diri dengan bantuan Karangasem.
6. Gianyar berada di bawah kekuasaan Klungkung.
7. Pada sekitar tahun 1800, Kerajaan Karangasem menjadi penguasa utama di pulau Bali dan pulau Lombok.¹¹

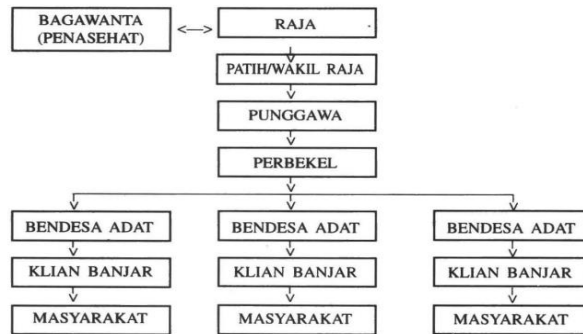
Pada sistem pemerintahan tradisional Bali, susunan hirarki kekuasaan cukup berbeda dengan daerah lain di Nusantara. Walaupun pada dasarnya susunan hirarki pemerintahan tetap berpedoman pada tingkat tertinggi sampai ke tingkat terendah dengan raja sebagai pemegang tertinggi kekuasaan. Saat ini, sistem pemerintahan

⁹ Alit, Dewa Made. "Pengaruh Politik Etis Terhadap Bangkitnya Nasionalisme Di Bali Tahun 1914–1941: The Influence of Ethical Politics on the Rise of Nationalism in Bali." *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial* 4, No. 1 (2023): 1-12, <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i1.2770>.

¹⁰ Wijaya, Nyoman. "Melawan Ajeg Bali: Antara Eksklusivitas dan Komersialisasi." *Tantular Jurnal Ilmu Sejarah* 2, (2004): 174, <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.45435>.

¹¹ Suwondo, B. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali*. (Jakarta: Kemendikbud, 1978).

tradisional Bali yang lengkap sulit ditemui, terutama dalam aspek struktur tingkat atas dan tengahnya. Meskipun demikian, struktur di tingkat bawah, seperti desa adat dan banjar, masih eksis dan bahkan terus dijaga serta diperkuat. Lembaga-lembaga ini dianggap sebagai wadah yang paling cocok untuk menyebarkan ajaran agama Hindu dan melestarikan warisan budaya Bali.¹²



Bagan. Hirarki Kekuasaan Pemerintah Tradisional Bali

Tingkatan	Fungsi dan Kewenangan
Raja	Pengaruh yang dimiliki oleh seorang raja sangat besar di dalam masyarakat, sehingga individu tersebut nampak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di seluruh wilayah kerajaan. Cara raja berinteraksi dengan rakyat diatur melalui suatu tata kelola birokrasi tradisional yang sudah menjadi pola dalam sistem pemerintahan.
Patih	Jabatan patih berada secara langsung di bawah kekuasaan raja, dan dari segi keturunan, terkadang seorang patih memiliki hubungan genealogis dengan raja. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan raja-raja dari keturunan Karangasem yang memimpin di Buleleng (1804-1849), terdapat dua periode di mana jabatan patih dipegang oleh keturunan raja. Pada masa pemerintahan I Gusti Gde Karangasem, patihnya adalah I Gusti Bagus Djelantik Banjar, dan kemudian pada masa pemerintahan I Gusti Made Karangasem, patihnya adalah I Gusti Ketut Djelantik.

¹² Sentana, Gek Diah Desi, and Paya Widiata. "Pemertahan Bahasa Bali Dan Konsep Tri Hita Karana Dalam Struktur Pemerintahan Tradisional Ulu-Apad Di Desa Sukawana Desa Pakraman Sukawana." *Prosiding Nasional* (2019): 48-52.

Punggawa	Seorang punggawa memiliki tanggung jawab untuk mendukung raja dalam aspek pemerintahan, dan terkadang mereka juga dapat memberikan bantuan dalam urusan adat dan agama di wilayah kekuasaannya. Dari sudut pandang hierarki, raja memiliki wewenang untuk memberikan perintah langsung kepada seorang punggawa, dan sebaliknya, seorang punggawa memiliki tanggung jawab langsung kepada raja.
Perbekel	Pada desa-desa Kuno itu fungsi desa dan banjar dipisahkan dengan jelas. Desa hanya bertugas mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan sedangkan banjar bertugas melakukan kegiatan untuk kepentingan warganya. Suatu badan yang disebut duluan desa terdiri dari orang-orang tua yang dipilih berdasarkan peraturan-peraturan setempat. Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Bendesa Adat	Bendesa adat hanya bertugas mengurus hal-hal yang berhubungan dengan upacara dan ritual keagamaan.
Klian Banjar	Sebagai unit terkecil dalam suatu kelompok desa, banjar dipimpin oleh seorang yang disebut klian. Sebagai lembaga masyarakat, banjar memiliki struktur organisasi yang melibatkan klian banjar sebagai pemimpin utama, didukung oleh beberapa individu seperti juru arah atau saya yang bertugas memberikan informasi penting kepada warga banjar (krama banjar). Setiap banjar memiliki tempat pertemuan yang disebut balai banjar, dilengkapi dengan bale kulkul (kentongan).

Pada awalnya, organisasi pemerintahan tradisional di Bali dibangun berdasarkan sistem pemerintahan kerajaan. Struktur birokrasinya diatur sesuai dengan hierarki mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Dalam kerangka birokrasi tersebut, raja menduduki posisi paling tinggi dan memiliki kekuasaan besar dalam masyarakat. Pribadi raja dianggap sebagai pemegang kekuasaan di seluruh wilayah kerajaan. Hal ini tercermin dalam struktur administrasi kerajaan yang mengikuti model sistem politik patrimonial. Semua kegiatan administrasi pemerintahan difokuskan di istana (puri). Tidak mengherankan jika istana pada masa itu dianggap sebagai pusat peradaban.

Sedangkan kehidupan sosial ekonomi pada akhir abad XIX, pola kehidupan masyarakat di Bali masih mencerminkan tatanan tradisional, yang menunjukkan bahwa pengaruh unsur kebudayaan luar atau asing belum begitu mencolok. Masyarakat tradisional di Bali dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu pertama, masyarakat agraris di mana

fokus utama masyarakat adalah pada kegiatan pertanian. Sebagai hasilnya, berbagai sistem yang mereka anut, termasuk sistem kemasyarakatan, organisasi, dan tata kehidupan, memberikan ciri khas tersendiri.¹³ Hal ini terlihat pada pola kehidupan masyarakat pantai anggota masyarakatnya aktif terlibat dalam kehidupan di laut, baik sebagai nelayan maupun pedagang laut. Kehidupan masyarakat pantai akan lebih terbuka pada kebudayaan-kebudayaan asing sehingga lebih dinamis dibandingkan dengan kehidupan masyarakat di pedesaan.

Komunitas masyarakat pedesaan sebagai masyarakat agraris telah memiliki sistem irigasi yang telah dikenal dengan sistem subak. Organisasi subak ini bertugas mengatur perairan sawah dan telah memiliki peraturan-peraturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang disebut *awig-awig subak* atau *sima*.¹⁴ Organisasi subak di Bali pada umumnya mempunyai kepengurusan yang terdiri dari klian subak dan pekaseh berkewajiban mengatur pembagian air di sawah. Klian subak dibantu oleh:

- a. Penyarikan yang bertugas sebagai sekretaris,
- b. Sedahan tembuku yang bertugas mengurus pajak serta berstatus sebagai bendahara,
- c. Juru arah mempunyai tugas memanggil *krama* (anggota), Subak apabila ada *pesangkepan* (pertemuan).

Tugas dan kewajiban daripada *krama subak* itu antara lain membuat bendungan, membagi air melalui selokan-selokan, menjaga air (*metelik*). Penghasilan organisasi subak ini didapat dari hasil denda pencurian air, denda para anggotanya apabila ada yang melanggar "*kerta sima*" (peraturan-peraturan yang berlaku). Struktur sosial yang jelas terbentuk pada peradaban subak Bali adalah organisasi subak. Sebagai organisasi atau lembaga yang bersifat otonom, subak tidak mempunyai kaitan perintah dan tanggung jawab langsung kepada lembaga lain, baik di tingkat desa, kecamatan, Terhadap lembaga di luar subak, sifatnya hanya koordinatif, yaitu mengkoordinasi kegiatan subak agar dapat dimaklumi dan jika diperlukan diajak berpartisipasi dan mendukung agar kegiatan tersebut berjalan sukses.¹⁵

Komunitas desa, sebagai entitas integral dalam masyarakat, memiliki hubungan sosial yang sangat erat. Setiap individu dalam masyarakat diharapkan patuh terhadap norma-norma yang berlaku di desa mereka (*awig-awig desa*), termasuk dalam hal adat

¹³Tanu, I. Ketut. "Bali Aga Dalam Perubahan Sosial Budaya." *VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.25078/vs.v4i1.698>.

¹⁴Berikut adalah contoh dari bentuk *sima*, lihat: F.A. Liefcrinck, *Nog beberapa peraturan dan perjanjian dari para penguasa Bali* (S-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921), 258-369.

¹⁵ Geria, I. Made, Surjono H. Sutjahjo, and Rachman Kurniawan. "Subak sebagai Benteng Konservasi Peradaban Bali." *AMERTA* 37, no. 1 (2019): 39-54, <https://doi.org/10.25078/vs.v4i1.698>.

istiadat dan kebiasaan. Keterikatan ini tercermin dalam sistem gotong royong yang dimiliki oleh setiap desa di Bali, di mana setiap warga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan gotong-royong ketika tenaganya dibutuhkan untuk kepentingan desa, seperti dalam upacara adat atau proyek pembangunan desa. Dalam bidang perdagangan Sejak awal abad ke-19, perdagangan antara Bali, Lombok, dan Batavia semakin intensif. Kapal-kapal dari Bali mengangkut berbagai komoditas seperti beras, gula, asam, minyak kelapa, babi, pinang, malam, kayu, dan garam ke Batavia. Sementara itu, kapal dari Lombok membawa muatan seperti beras, malam, kayu, sapan, dan garam. Kapal-kapal dari Batavia mengirimkan barang-barang seperti porselen, kain, besi tua, obat-obatan, ikan asin, tembaga, barang dari Cina, menyan, dan ketumbar ke Bali.

Selama abad tersebut, perdagangan di Bali dan Lombok tidak hanya mencakup hasil pertanian, melainkan juga terlibat dalam perdagangan budak yang baru berakhir pada awal abad ke-20. Pada tahun 1839, NHM (*Nederlandsch Handel Maatschappij*) membuka kantor di Kuta-Badung, tetapi interaksi langsung dengan raja-raja Bali terbatas karena mereka memiliki subandar yang menangani urusan orang asing, terutama dalam perdagangan. Setelah tahun 1849, perdagangan di Bali Selatan, terutama di Kuta, mengalami penurunan, dan pusat perdagangan beralih ke Buleleng sehingga Singaraja menjadi pusat perdagangan di wilayah Indonesia Timur dan Sunda Kecil khususnya. Ditinjau dari faktor geografi memang Bali utara lebih memungkinkan pada waktu itu untuk menjadi pusat perdagangan karena di sana sejak dahulu sudah memiliki tiga pelabuhan alam, yaitu Temukus, Buleleng dan Sangsit.¹⁶ Melalui *Staatsblad* 1883: 267 ditetapkan Pabean Buleleng, Temukus dan Sangsit sebagai perkampungan Cina dan Pabean Buleleng sebagai perkampungan orang-orang Timur Asing dikarenakan dengan semakin ramainya Bali selatan sebagai wilayah pusat perdagangan maka di Singaraja dijadikan permukiman khusus untuk mereka.¹⁷

Pengaruh Politik Etis Pada Pendidikan di Bali

Perkembangan pendidikan di Bali memainkan peran yang signifikan dalam konteks masa kebangkitan nasional di wilayah tersebut. Pada masa tersebut, ide-ide pembaharuan masyarakat, organisasi sosial, dan pergerakan nasional banyak dipengaruhi oleh kemajuan pendidikan. Sebagaimana dibahas sebelumnya dalam bagian-bagian sebelumnya mengenai pengaruh politik etika di Bali, terlihat bahwa

¹⁶Martini, Martini, and Alit Dewa Made. "Peranan Pelabuhan Buleleng Sebagai Pusat Pelayaran Dan Jalur Perdagangan Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1846-1939.: The Role of Port of Buleleng As A Sailing Center and Trade Line During the Government of the Dutch East Indies in 1846-1939." *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 12-19, <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v1i1.861>.

¹⁷ C.J. Grader, *Nota van toelichtingen betreffende het in te stellen zelfbesturend Landschap Boeleleng* (tanpa tahun), p. 51.

tokoh-tokoh yang memegang peranan penting dalam perkumpulan-perkumpulan lokal kebanyakan memiliki latar belakang dan kontribusi dalam dunia pendidikan. Untuk melihat kemajuan masyarakat Bali dalam bidang pendidikan, dapat diamati pertumbuhan sekolah-sekolah di Bali sejak pendirian awal hingga sekitar tahun 1930.

Pemerintah Hindia-Belanda pertama kali membangun sekolah di Bali *Tweede klasse school* bertempat di kota Singaraja pada tahun 1875 tepat setelah 7 tahun berakhirnya perang Banjar. Pada masa itu, pemerintah menghadapi kesulitan yang besar dalam merekrut murid, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Salah satu penyebab utamanya adalah situasi sosial di Bali, terutama terkait dengan adanya sistem kasta dan keterikatan pada pola-pola pemikiran tradisional.¹⁸ Kondisi ini memberikan kendala signifikan bagi upaya pemerintah dalam mendapatkan partisipasi murid. Kendati demikian, kebutuhan mendesak untuk tenaga administrasi pemerintahan dan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Bali mendorong pemerintah untuk mengatasi kekurangan murid dengan cara-cara yang kadang-kadang memaksa. Upaya ini terus berlanjut hingga sekitar tahun 1915, di mana situasi tersebut mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengembangkan sektor pendidikan di Bali.

Rupanya sistem pendidikan kolonial memberikan warna tersendiri dalam masyarakat di beberapa daerah di Indonesia seperti halnya dialami oleh masyarakat di Jawa. Demikian pula di Bali setelah dibukanya *Eerste Inlandsche School* dan kemudian disusul dengan HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) pada tahun 1913 di Singaraja, di mana ke banyakan murid-murid yang diterima hanya dari kalangan keluarga raja-raja, anak-anak para punggawa dan dari kalangan bangsawan. Dalam bidang pendidikan (edukasi); sistem pendidikan lebih dititik beratkan pada pendidikan tingkat rendah, karena hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pegawai yang sedikit cakap, untuk ditempatkan pada administrasi pegawai dan tenaga administrasi pada perusahaan-perusahaan asing.¹⁹

Pada tahun 1918, sekolah dasar dibuka di Denpasar untuk wilayah Bali Selatan. Namun, karena keterbatasan ruangan, dua kelas tambahan dibuka di Klungkung dan Karangasem. Keterbatasan akses ke Sekolah Dasar Tinggi (HIS) terlihat, terutama terbatasnya orang-orang yang dapat masuk, yang sebagian besar berasal dari golongan penguasa (raja, punggawa), atau keluarga bangsawan. Berbeda dengan sekolah "Bumi Putra" atau *Inlandsche School* dan sekolah desa, HIS memberikan pendidikan yang lebih

¹⁸Pendidikan, Departemen. "Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah." *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatra Barat* (1977). 25.

¹⁹Alit, Dewa Made. "Pengaruh Politik Etis Terhadap Bangkitnya Nasionalisme Di Bali Tahun 1914–1941: The Influence of Ethical Politics on the Rise of Nationalism in Bali." *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023): 1-12, <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i1.2770>.

luas. Di samping membaca, menulis, dan berhitung, murid-murid HIS juga mendapatkan pengajaran bahasa Belanda selain bahasa Melayu. Secara bersamaan dengan pembukaan beberapa sekolah HIS di berbagai kota di Bali, pada tahun 1914, di Singaraja juga didirikan sebuah sekolah khusus untuk orang-orang Tionghoa, yakni *Hollandsch Chineesche School*. Kehadiran sekolah ini menanggapi keberadaan yang cukup besar dari komunitas Tionghoa di Singaraja, yang dikenal dengan sebutan Singkeh pada waktu itu.

Pada tahun 1923, didirikan suatu perkumpulan di Singaraja yang diberi nama Shanti. Shanti berhasil mendirikan "Sekolah Perempuan Shanti" dengan dukungan dari pemerintah, termasuk bantuan peralatan dan lain sebagainya. Selain itu, berkat bantuan dari tokoh-tokoh terkemuka, perkumpulan ini juga mampu menerbitkan kalawarta dengan nama "*Santi Adnyana*." Sayangnya, kala-warta ini hanya berumur satu tahun, sementara Sekolah Perempuan Shanti tetap beroperasi hingga tahun 1926.

Pada tahun 1924, perkembangan pendidikan di Bali terbatas pada tingkat HIS, dengan jumlah sebanyak 2 sekolah. Selain itu, terdapat 24 sekolah setingkat dengan sekolah rendah. Namun, antara tahun 1926 hingga 1929, terjadi peningkatan signifikan dalam pendidikan di Bali. Puncaknya adalah pembukaan *Europeesche Lagere School*, satu-satunya sekolah Belanda, di Singaraja. HIS juga telah dibuka di beberapa daerah, seperti Buleleng, Badung, Klungkung, dan Lombok Barat hingga tahun 1929. Sementara itu, *Tweede Klasse Scholen*, yang berjumlah 29 sekolah, dan sekolah Desa (*Volks Scholen*) sebanyak 109 buah, sudah terbuka hampir di seluruh kerajaan di Bali.²⁰

Tumbuhnya Organisasi-Organisasi Embrio Dari Kebangkitan Nasional di Bali

Kebijakan Etis pemerintah Kolonial Belanda dalam mendirikan sekolah untuk anak-anak pribumi di Indonesia dianggap sebagai langkah awal dalam perjuangan pemuda. Meskipun mayoritas yang diizinkan untuk bersekolah adalah anak-anak dari kalangan bangsawan pribumi atau elit pribumi, namun pada akhirnya anak-anak bangsawan tersebut muncul sebagai kaum intelektual yang peduli terhadap nasib bangsanya yang tertindas.²¹ Munculnya organisasi-organisasi yang menjadi embrio dari kebangkitan nasional di Bali sendiri menandai awal dari gerakan perjuangan untuk kemerdekaan. Beberapa organisasi ini berperan penting dalam menggalang semangat persatuan dan kesadaran nasional.

²⁰ Caron, L. J. J. "Memorie van Overgave van den Resident van Bali en Lombok." *Report at the Handing-Over of the Resident of Bali and Lombok*. August (1929). 97-98.

²¹ Susilo, Agus, and Isbandiyah Isbandiyah. "Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia." *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 6, no. 2 (2018): 403, <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1531>.

1. Perkumpulan Suita Gama Tirta

Didirikan oleh I Gst. Putu Djelantik yang pada waktu itu bekerja pada *Raad van Kerta* di Singaraja merupakan anak dari golongan bangsawan dan orang terpandang di Bali. Organisasi ini pada intinya bergerak dalam bidang pendidikan. Suita Gama Tirta, yang anggotanya berasal dari seluruh lapisan masyarakat Bali yang terdiri dari empat kasta, pada dasarnya memiliki tujuan murni untuk memuliakan agama dan menginisiasi pembaharuan dalam bidang adat dan agama. Memuliakan agama bertujuan memberikan pendidikan agama kepada para pemuda yang tertarik pada pengetahuan agama. Pada saat itu, upaya ini dimulai untuk memberikan pengetahuan agama kepada semua golongan, bukan terbatas pada golongan Brahmana atau Ksatria saja. Ini mencerminkan upaya pembaharuan dalam sistem kepercayaan terkait tradisi, di mana sebelumnya hanya orang dari kasta Brahmana atau Ksatria yang diizinkan mempelajari agama atau membuka lontar-lontar yang terkait dengan kerajaan.

Golongan kasta lainnya dilarang melakukan hal tersebut. Saat itu, ada tradisi "ajrawera" yang mengisyaratkan bahwa informasi tertentu tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Larangan ini termasuk pembacaan kitab-kitab Weda atau pengucapan mantram-mantram Weda bagi mereka yang belum disucikan (Bahasa Bali: mewinten). Para pemuda yang tergabung dalam Suita Gama Tirta menolak untuk mempertahankan tradisi seperti itu, karena dianggap sebagai hambatan terhadap kemajuan. Mereka berusaha untuk menghapus batasan-batasan tersebut dan menyuarakan pandangan bahwa pengetahuan agama seharusnya dapat diakses oleh semua golongan masyarakat, tanpa memandang kasta mereka.

2. Perkumpulan Shanti

Perhimpunan ini berdiri di Singaraja pada tahun 1923 dan sebagian besar anggotanya berasal dari Sekehe Jongkok. Awalnya, Sekehe Jongkok merupakan perkumpulan simpan pinjam uang di dalam suatu Banjar (kampung). Menariknya, perkumpulan ini mengalami perkembangan yang beruntung, di mana anggota Sekehe Jongkok yang awalnya hanya terlibat dalam kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang di suatu Banjar, setelah berdirinya perkumpulan Shanti, mulai bergabung dengan pemuda-pemuda Lainnya, seperti guru-guru dan pegawai. Mereka juga aktif membuka kursus-kursus agama.

Pada awalnya, Perkumpulan ini mendapat dukungan yang cukup luas dari berbagai lapisan masyarakat dan juga dari pihak pemerintah. Akibatnya, pada tahun 1923, Perkumpulan Shanti berhasil mendirikan Sekolah Perhimpunan Shanti yang melibatkan para ibu-ibu sebagai siswa. Panitia pendiri sekolah ini

terdiri dari Wayan Ruma, Ketut Nasa, Made Kaler, Nyoman Kadjeng, I Gst. Putu Djelantik, I Gst. Tjakra Tanaya, dan sebagai penasehat: Ida Bagus Geigel dan Pedanda Putu Geria.

3. Perhimpunan Satya Samudaya Bau Danda Bali Lombok (SS BBL).

Sebuah organisasi yang berfokus pada upaya *studie-fonds* telah berhasil didirikan di Karangasem dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Januari 1925. Sesuai dengan Anggaran Dasar SSBBL pada Pasal 2, organisasi tersebut memiliki tujuan:

- a. Menyimpan uang.
- b. Mengelola (mengusahakan) uang.
- c. Membentuk dana (tabungan persediaan).²²

Di antara para pegawai negeri di kerajaan dan beberapa tokoh terkemuka di daerah tersebut, seperti raja Karangasem, punggawa, dan beberapa Pendeta, muncul pemikiran untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya dari tingkat Tweede Klasse School ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Seperti yang disebutkan dalam bidang pendidikan, hingga tahun 1926, hanya terdapat catatan tentang sekolah-sekolah di Bali pada tingkat sekolah dasar.

4. Bali Adnyana

"Bali Adnyana" bukanlah sebuah organisasi atau perkumpulan, melainkan sebuah kelompok dari golongan atas yang muncul sebagai hasil dari pemahaman bersama terkait konflik sosial di Singaraja pada waktu itu. Lahirnya golongan "Bali Adnyana" dapat ditelusuri ke belakang sebagai kelanjutan dari perkumpulan Shanti yang telah didirikan pada tahun 1923. Setelah perkumpulan Shanti mengalami kemunduran, terjadi perpecahan di antara anggotanya. Perpecahan tersebut disebabkan oleh masalah kasta, sehingga muncul dua kelompok yang saling berlawanan, yaitu golongan Triwangsa dan golongan Jaba. Golongan Triwangsa berkeinginan untuk tetap mempertahankan sistem status yang berdasarkan ascription, sementara golongan Jaba ingin menghapuskan sistem kasta tersebut. Dengan demikian, mereka bermaksud untuk sepenuhnya menerapkan sistem status berdasarkan achievement.²³ Bali Adnyana meluaskan penyebarannya sampai ke Lombok Barat. Studi mengenai ide-ide dari golongan Bali Adnyana pada periode 1925 - 1928.

5. Perkumpulan Surya Kanta

²² Lihat dokumen arsip ADRT *Algemeene Huishoudelijk Reglement Perhimpunan Satya Samoedaja Baod Danda Bali Lombok*

²³ Konsep mengenai pola-pola ascription dan achievement dapat ditemukan dalam karya Talcott Parsons, "The Social System" (New York: The Free Press, 1964, hal. 180-200).

Perkumpulan ini muncul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pada dasarnya melibatkan pengaruh pendidikan dan kondisi sosial pada masa itu. Seiring dengan meningkatnya jumlah pelajar Bali yang menyelesaikan pendidikan mereka di Jawa, terutama di sekolah pendidikan guru di Probolinggo, banyak di antara mereka kembali ke Bali untuk bekerja sebagai guru di Singaraja, terutama di sekolah-sekolah Tweede Klasse School dan HIS. Beberapa di antara mereka adalah Wayan Ruma, Ketut Sukarata, Nengah Metra, dan Ketut Kaler.²⁴

Guru-guru ini, di antara mereka, mulai memiliki gagasan untuk memajukan pendidikan, terutama untuk golongan Jaba, dan lebih luas lagi, untuk meningkatkan taraf kehidupan dan pengetahuan masyarakat Bali yang masih tertinggal. Gagasan ini muncul dari kesadaran akan kebutuhan untuk menyebarkan pengetahuan modern dan meningkatkan kondisi kehidupan di kalangan masyarakat yang masih terbelakang di Bali.

Sebagaimana halnya dengan Bali Adnyana, pengaruh dari perkumpulan Surya Kanta juga meluas hingga ke Lombok, seperti yang terlihat pada pertemuan umum Surya Kanta pada tanggal 21 Maret 1926. Pada kesempatan tersebut, utusan dari cabang Lombok turut hadir, yang diwakili oleh Nengah Merta, Wayan Alit, Nyoman Dama, dan Wayan Gema. Kemajuan yang signifikan dalam ranah organisasi terlihat dari keputusan-keputusan penting yang diambil oleh perkumpulan "Surya Kanta" berdasarkan hasil rapat umum tanggal 21 Maret 1926, antara lain:

- a. Para anggota diberikan kebebasan untuk aktif dalam politik.
 - b. Kebebasan memberikan pertimbangan dan campur tangan dalam perkumpulan-perkumpulan lain di bidang politik.
 - c. Sesuai dengan Rechtspersoon.
6. Perhimpunan Catur Wangsa Derya Gama Hindu Bali

I Gusti Bagus Djelantik berhasil mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama "Perkumpulan Catur. Wangsa Derya Gama Hindu Bali" (Tjwadega Hindu Bali). Pembentukan perkumpulan ini dilakukan pada tanggal 2 Mei 1926 di Klungkung. Tujuan utama dari perkumpulan ini, antara lain, adalah untuk menghilangkan pertentangan kasta yang sedang terjadi di Bali Utara dan memulihkan persatuan di antara keempat golongan kasta di Bali sesuai dengan aturan dharma mereka masing-masing. Dalam Anggaran Dasar Perhimpunan Catur Wangsa Derya Gama Hindu Bali, dapat disimpulkan bahwa perkumpulan ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memajukan masyarakat Bali secara

²⁴ Lihat dokumen Statuten Soerya Kanta 1 November 1935 yang dimuat di Madjalah Soerya Kanta No. 2, Th. I, November 1925 hal. 16.

positif, asalkan tidak bertentangan dengan tradisi dan adat istiadat, serta melakukan perubahan pada adat yang tidak sejalan dengan perkembangan zaman.

Tumbuhnya organisasi-organisasi di Bali pada masa tersebut dapat dianggap sebagai embrio dari kebangkitan nasional. Organisasi-organisasi tersebut muncul sebagai wadah bagi pemikiran-pemikiran progresif dan semangat nasionalisme yang berkembang di tengah masyarakat Bali. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam organisasi-organisasi ini seringkali memiliki peran penting dalam merangsang perubahan sosial dan politik di tingkat lokal, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kebangkitan nasional secara lebih luas. Dalam konteks pendidikan, organisasi-organisasi ini mungkin menjadi pusat ide-ide reformasi dan modernisasi. Mereka dapat menjadi tempat berkumpulnya pemikir-pemikir progresif yang mendorong perubahan dalam sistem pendidikan lokal. Selain itu, organisasi-organisasi ini juga mungkin menjadi platform untuk menyebarkan pemikiran nasionalis dan semangat persatuan di antara masyarakat Bali.

Kesimpulan

Kondisi sosial politik masyarakat Bali yang masih menganut sistem tradisional dimana sistem hierarki kerajaan sangat mendominasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Berbagai upaya pemerintah kolonial Belanda untuk mengukuhkan inasinya di pulau Bali pada awalnya terlihat melalui usaha mereka untuk terlibat dalam urusan pemerintahan bersama raja-raja setempat. Contohnya dalam penerapan politik etis dalam bidang edukasi, walaupun pada faktanya tidak semasif di Pulau Jawa namun pada pelaksanaannya terdapat peningkatan sekolah-sekolah yang bisa diakses oleh masyarakat golongan bangsawan maupun pribumi. Tindakan politik kolonial Belanda dalam menciptakan perbaikan dalam kehidupan di Bali menimbulkan masalah dalam struktur status sosial. Upaya pemerintah Belanda untuk melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan modern. Karena pada dasarnya pendidikan yang digaungkan oleh pemerintah kolonial hanya sebatas dalam untuk mempersiapkan tenaga kerja pemerintah. Namun yang menarik akibat dari politik etis banyak muncul organisasi yang bersifat lokal yang menjadi embrio dalam kebangkitan nasional. Karena pengaruh kebijakan Etis terhadap munculnya semangat nasionalisme di Bali terkait dengan kemunculan elit baru yang modern, yang muncul melalui pendidikan Barat. Bisa disimpulkan bahwa antara pendidikan dari hasil politik etis dengan munculnya pergerakan nasional yang bersifat lokal di Bali tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Kartodirjo, Sartono. *Introduction to the History of Indonesia: From Emporium to Imperium*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Paeni, M. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Pengetahuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. Routledge, 2013.
- Reuter, Thomas, ed. *Inequality, Crisis and Social Change in Indonesia: The Muted Worlds of Bali*. Routledge, 2003.
- Ricklefs, Merle Calvin. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Sukmana, W. J. *Metode Penelitian Sejarah*. Seri Publikasi Pembelajaran. Semarang: Garudhawacana, 2016, 1-4.
- Suwondo, B. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali*. Jakarta: Kemendikbud, 1978.
- Agung, A. A. G. P. "Lahirnya Ide-Ide Pembaharuan dalam Organisasi Sosial di Bali." *Basis Majalah Ilmiah*, (1972).
- Alit, Dewa Made. "Pengaruh Politik Etis Terhadap Bangkitnya Nasionalisme di Bali Tahun 1914–1941: The Influence of Ethical Politics on the Rise of Nationalism in Bali." *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023).
- Geria, I. Made, Surjono H. Sutjahjo, and Rachman Kurniawan. "Subak sebagai Benteng Konservasi Peradaban Bali." *AMERTA* 37, no. 1 (2019).
- Martini, Martini, and Alit Dewa Made. "Peranan Pelabuhan Buleleng Sebagai Pusat Pelayaran Dan Jalur Perdagangan Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1846-1939.: The Role of Port of Buleleng As A Sailing Center and Trade Line During the Government of the Dutch East Indies in 1846-1939." *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020).
- Sentana, Gek Diah Desi, and Paya Widiata. "Pemertahan Bahasa Bali Dan Konsep Tri Hita Karana Dalam Struktur Pemerintahan Tradisional Ulu-Apad Di Desa Sukawana Desa Pakraman Sukawana." *Prosiding Nasional*, (2019).
- Setiawan, A. I., & Pratama, M. A. Q. *Karakteristik Pendidikan Islam Periode Nabi Muhammad di Makkah dan Madinah*. NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, Vol 2, (2018).
- Susilo, Agus, and Isbandiyah Isbandiyah. "Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia." *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 6, no. 2, (2018).
- Tanu, I. Ketut. "Bali Aga Dalam Perubahan Sosial Budaya." *VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama* 5, No. 1 (2019).
- Wijaya, Nyoman. "Melawan Ajeg Bali: Antara Eksklusivitas dan Komersialisasi." *Tantular Jurnal Ilmu Sejarah*, Vol 2, (2004).

Arsip

F.A. Liefvick, *Nog beberapa peraturan dan perjanjian dari para penguasa Bali* (S-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921), 258-369.

Statuten Soerya Kanta 1 November 1935 yang dimuat di *Madjalah Soerya Kanta* No. 2, Th. I, November 1925 hal. 16.

ADRT Algemeene Huishoudelijk Reglement Perhimpunan Satya Samoedaja Bae Danda Bali Lombok

C.J. Grader, *Nota van toelichtingen betreffende het in te stellen zelfbesturend Landschap Boeileleng* (tanpa tahun), p. 51

Caron, L. J. J. "Memorie van Overgave van den Resident van Bali en Lombok." *Report at the Handing-Over of the Resident of Bali and Lombok*. August (1929). 97-98.